

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia saat ini, dengan adanya pandemi membuat pergerakan manusia menjadi sangat terbatas. Fenomena pandemi banyak berdampak pada aspek penting kehidupan manusia, seperti kesehatan, ekonomi, politik dan juga keamanan. Pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia membuat umat manusia berada dalam kesedihan dan kecemasan mendalam (Sow et al., 2021). Pemerintah memberikan himbauan untuk melakukan *social distancing* atau pembatasan sosial guna mengurangi interaksi antar manusia dan resiko penyebaran virus yang lebih luas lagi. *Work from home* atau WFH merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk pegawai dapat tetap melakukan pekerjaannya meskipun di rumah.

Penggunaan internet serta sistem berbasis teknologi informasi merupakan solusi terbaik berbagai aspek kehidupan. Penggunaan sistem berbasis teknologi menghasilkan kecepatan dalam penyampaian informasi, kemudahan dalam penggunaannya dan ekonomis merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan yang harus dilakukan pada saat pandemi. Penggunaan sistem berbasis teknologi dan memanfaatkan jaringan internet, interaksi jarak jauh dapat dilakukan dan menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dilakukan bukan hanya oleh pihak swasta namun juga oleh pemerintah. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan juga mendorong harus dilakukannya perubahan pada sistem penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga pemerintahan tidak hanya dituntut untuk dapat melayani publik dengan sebaik mungkin, tetapi juga melakukan efisiensi anggaran belanja yang dianggap tidak perlu, sehingga menghasilkan efisiensi terhadap anggaran pemerintah.

Pemerintah saat ini telah melakukan perubahan sistem pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terpercaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel melalui penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Perpres No 95 tahun 2018, kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini dilakukan secara manual, saat ini di arahkan untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Saat ini sudah ada beberapa kementerian atau lembaga yang sudah menerapkan sistem aplikasi pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi, antara lain yaitu aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada kementerian keuangan, aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan yang sangat terbaru saat ini yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan hasil dari penerapan UU No 95 tahun 2018 tentang SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki beberapa *outcome*, satu diantaranya adalah meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) serta sumber daya manusia (SDM) yang baik. Perkembangan TIK yang sangat pesat memberikan peluang inovasi untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan memanfaatkan penggunaan *mobile internet*. Hal yang tidak kalah penting juga adalah dukungan SDM yang kompeten untuk dapat mewujudkan perubahan dalam pelaksanaannya. Unsur yang merupakan kunci utama terwujudnya pelaksanaan SPBE ini adalah pengembangan dan pemanfaatan TIK serta SDM untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu sistem pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang secara tidak langsung dapat mewujudkan efisiensi anggaran. (Perpres No 95 tahun, 2020)

Penelitian terhadap penggunaan TIK telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain oleh Dwiningsih (2017) yang pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemakaian teknologi informasi yang tepat dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja karyawan administrasi dalam hal ini penelitian dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pemanfaatan teknologi informasi pada karyawan administrasi Universitas Muhammadiyah Surakarta

dapat dikatakan baik karena sudah memanfaatkan teknologi informasi yang telah disediakan. Secara empiris penelitian membuktikan nilai koefisien determinan sebesar 54,9% berarti variabel pemanfaatan teknologi informasi dan efektivitas pengguna mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 54,9% dan sisanya 45,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Penelitian penggunaan TIK pada sistem penyelenggaraan pemerintah yang pernah dilakukan oleh Rosano & Farabi (2019) tentang penggunaan aplikasi *e-voting* yang dapat menekan biaya penyelenggaraan pilkada di desa Kedungbanjar, Pemalang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bila penggunaan *e-voting* di desa Kedungbanjar dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-voting* yang merupakan aplikasi berbasis elektronik, dengan terlebih dahulu dilakukan tahap perencanaan penggunaan aplikasi pada proses pemilihan dan melakukan sosialisasi terhadap cara penggunaan aplikasi *e-voting* tersebut sehingga penggunaan aplikasi *e-voting* dapat menghemat biaya pada pelaksanaan pilkada di desa Kedungbanjar, Pemalang.

Kementerian Kesehatan RI sebagai salah satu penyelenggara keuangan negara menjalankan amanat UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dimana pada pasal 9 disebutkan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) mempunyai tugas yang salah satunya adalah menyusun rancangan anggaran K/L. Namun dalam pelaksanaan untuk menyusun anggaran suatu K/L dilakukan melalui proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaan kegiatan *desk/review* RKA-KL dengan metode tatap muka dilakukan dengan mengundang seluruh perencana dari setiap satker yang berada di bawah naungan ditjen P2P datang ketempat kegiatan untuk melakukan *desk* dengan cara tatap muka langsung. Pada setiap pelaksanaan kegiatan *desk* membutuhkan waktu penyelenggaraan yang cukup panjang, kurang lebih dibutuhkan waktu dua minggu untuk proses verifikasi oleh verifikator. Pelaksanaan *desk* juga akan menghasilkan sejumlah data dukung kegiatan dari semua satker yang berada dalam naungan Ditjen P2P. Data dukung kegiatan berupa hardcopy akan disimpan dalam bentuk cetakan kertas yang disusun didalam bantek-bantek tebal. Pada umumnya setiap satker akan memberikan masing-masing satu buah bantek bahkan lebih dalam satu kegiatan *desk* RKA-KL. Untuk itu setiap kali melakukan desk, substansi Program

dan Informasi akan memiliki sejumlah arsip kegiatan sebanyak 99 bantek dan akan memiliki 198 bantek data dukung untuk setiap tahunnya. Biaya penyelenggaraan yang cukup besar akan dikeluarkan oleh ditjen P2P dalam proses menyusun RKA-KL.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI mendukung pelaksanaan SPBE serta juga mengembangkan suatu sistem aplikasi berbasis elektronik dengan memanfaatkan penggunaan jaringan internet yang disebut aplikasi perencanaan *e-desk* dengan dibantu oleh pihak ke tiga sebagai perancang sistem aplikasinya. Pada penggunaan sistem aplikasi *e-desk* ini pelaksanaan *desk/review* yang biasa dilakukan tatap muka dapat dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan aplikasi *zoom meeting*. Aplikasi perencanaan *e-desk* berfungsi sebagai *server* yang menampung data-data yang diperlukan dalam proses pelaksanaan *desk/review* terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang berada tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai sistem yang baru digunakan, aplikasi *e-desk* membutuhkan banyak penyempurnaan. Penyempurnaan sistem yang dilakukan secara bertahap merupakan evaluasi terhadap sistem *e-desk*. Evaluasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan dan menjadi tolak ukur sejauh mana tujuan dapat dicapai.

Penggunaan aplikasi ini pada akhirnya merubah budaya kerja yang selama ini dilakukan secara manual digantikan dengan sebuah sistem yang berbasis elektronik. Permasalahan yang timbul adalah apakah penggunaan sistem aplikasi perencanaan *e-desk* mampu menggantikan cara kerja yang selama ini dilakukan dengan tatap muka langsung serta mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran pemerintah seperti tujuan dari penggunaan SPBE. Bagaimana kesiapan pegawai (SDM) sebagai pengguna aplikasi dapat beradaptasi menggunakan sistem yang baru ini.

Dengan adanya pertanyaan di atas maka penulis tertarik menelusuri lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi berbasis elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2P dibawah struktur organisasi kementerian Kesehatan RI. Penulis akan menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam sebuah penelitian yang

berjudul: “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sistem Aplikasi Perencanaan *E-desk* Pada Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018-2021**”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis akan mengemukakan spesifikasi masalah yang dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem perencanaan *e-desk*?
2. Apakah penggunaan sistem aplikasi perencanaan *e-desk* mampu mengubah budaya kerja pada proses *desk/review* RKA-KL di Direktorat P2P?

Rumusan pertanyaan di atas akan dijawab dengan penelitian melalui pengamatan, pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi serta menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem perencanaan *e-desk* pada Ditjen P2P.
2. Untuk mengetahui apakah sistem aplikasi perencanaan *e-desk* mampu mengubah budaya kerja pada proses *desk/review* RKA-KL pada Direktorat P2P

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sebuah sistem aplikasi yang dibuat oleh salah satu direktorat jenderal dibawah kementerian kesehatan RI dalam rangka menjalankan amanat Perpres No. 95 tahun 2018 untuk menggunakan sistem aplikasi berbasis elektronik dalam pelaksanaan kegiatannya. Penelitian dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran penerapan sistem aplikasi perencanaan *e-desk* serta mengetahui apakah implementasi sistem baru dapat

mengubah budaya kerja pada Ditjen P2P, sehingga dapat mencapai salah satu *outcome* dari Perpres No. 95 tahun 2018 yaitu meningkatkan efisiensi terhadap anggaran pemerintah. Sebagai novelty dari penelitian ini peneliti akan menjabarkan bagaimana implementasi sebuah sistem berbasis teknologi pada sebuah kementerian dapat mengubah budaya kerja pada instansi pemerintah dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan penerapan suatu sistem aplikasi yang merubah budaya kerja manual menjadi berbasis elektronik pada pemerintahan.
 - b. Menambah khasanah ilmu dan implementasi undang-undang No 95 tahun 2019 tentang penggunaan SPBE dalam rangka meningkatkan efisiensi terhadap anggaran pemerintah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan suatu sistem aplikasi pemerintahan yang berbasis elektronik sesuai dengan PERPRES No. 95 tahun 2018
 - b. Bagi Instansi Dit. P2P, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk pengembangan sistem perencanaan *e-desk* di masa yang akan datang.
 - c. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan juga referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan mengukur efektivitas dan efisiensi sebuah sistem yang di implementasikan yang membawa perubahan budaya kerja pada kementerian atau lembaga.